

## **MEMBUDAYAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK KEBERLANJUTAN PROSES PEMBANGUNAN D/H SEBUAH OPINI: MEMIMPIKAN PARTISIPASI MASYARAKAT BERKELANJUTAN**

**Wahidah KURNIAWATI**

Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Email: [w41lek@yahoo.com](mailto:w41lek@yahoo.com)

[wahidah.kurniawati@pwk.umdip.ac.id](mailto:wahidah.kurniawati@pwk.umdip.ac.id)

### **Abstrak**

*Selama ini terdapat beberapa kecenderungan partisipasi masyarakat sebagai proses pencarian legitimasi terhadap suatu program, proyek ataupun konsep yang sudah diskenarioakan oleh pemerintah. Mungkin tidak sepenuhnya semua proses pencarian legitimasi tersebut terjadi, tetapi beberapa kecenderungan tersebut terlihat dalam ketidakmampuan penyerapan masukan yang dihasilkan di tingkat desa/kelurahan ataupun klaster perencanaan ke tingkat perencanaan yang lebih tinggi. Hasil perencanaan di tingkat lebih bawah hanya menghasilkan wish list dibandingkan need list. Hasil usulan tersebut juga tidak terdokumentasi dan terdistribusi dengan baik ke dinas-dinas teknis terkait (Najib dalam Winarso, dkk [2002]). Hal ini diperparah dengan adanya adu kepentingan di tingkat wakil rakyat. Tentu saja, hal ini kita harapkan dapat dieliminasi dengan adanya hubungan aspirasi, hubungan kontrol, dan hubungan pertanggungjawaban (Ahmad, 2002) yang lebih sehat antara masyarakat, perwakilan masyarakat dan pemerintah setempat.*

*Ketika proses partisipasi kita harapkan berlanjut serta menjadi bagian dari budaya bangsa, budaya pemerintahan, dan budaya masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari perilaku dan kehidupan di semua aspek. Hal ini, bukan untuk mengagungkan partisipasi, tetapi untuk membudayakan dan memasukkan konsep partisipasi ke semua bidang dengan tanpa paksaan. Satu hal yang bisa menjadi contoh adalah adanya klaster-klaster perencanaan di daerah. Klaster sebagai wadah aspirasi dan partisipasi memiliki korelasi positif dalam mendidik masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Usulan kebutuhan anggota klasterpun terjaga dengan adanya pengawalan dari FEDEP ataupun BDS yang bersangkutan ke tingkat yang lebih tinggi. Walaupun kadang tidak bisa tersampaikan semua keinginan, tetapi proses partisipasi dalam klaster perencanaan cukup mengubah perilaku masyarakat dalam berdialog menyampaikan aspirasinya.*

*Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah memasukkan budaya partisipasi ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi. Sebenarnya budaya partisipasi sudah terwakili dalam beberapa konsep pembelajaran, seperti konstruktivisme dan student centre learning. Banyak sekolah yang cukup terbuka mengadopsi konsep ini dan diharapkan dapat mencetak lulusan yang lebih terbuka pikirannya, lebih menghargai orang, dan lebih inovatif. Diharapkan dengan adanya budaya partisipasi di sekolah, ketika mereka lulus dan masuk dunia nyata, mereka akan risih jika tidak menggunakan konsep partisipasi dalam pekerjaannya (tentu saja harus memperhatikan konteks pekerjaan yang dimaksud).*

*Selain itu, pembudayaan partisipasi bisa kita masukkan dengan menggunakan metode dakwah terhadap masyarakat religius. Aspek keyakinan akan memberi bingkai dan selanjutnya akan menjadi acuan tentang terhadap hakekat kehidupan. Hal ini akan menjadikan agama sebagai pemacu perubahan yang lebih baik dan bukan pendukung status quo (Usman, 2004). Tentu metode dakwah yang dipilih harus dikaji lebih mendalam lagi, agar agama tidak dijadikan alat legitimasi saja.*

Kata kunci: *Partisipasi masyarakat, berkelanjutan, budaya partisipasi*

### **PENDAHULUAN**

Reformasi tahun 1997 dan keluarnya UU No. 22/1999 jo UU 32/2004 jo UU 8/2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan satu proses pembelajaran baru tentang partisipasi bagi masyarakat Indonesia. Sebelum itu, proses partisipasi belum optimal dilakukan. Sejarah mencatat, bahwa selama berabad-abad bangsa kita tidak terbiasa melakukan dialog dan mengeluarkan pendapat. Selama 350 tahun kita dijajah Belanda dan 3.5 tahun dijajah Jepang, proses monolog dan perintah dari atas yang mendominasi kegiatan pemerintahan yang ada. Kemudian dilanjutkan oleh Masa Kemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru) yang diwarnai